

DAFTAR PUSTAKA

- Faud, Ramli Muhammad. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- <http://bpk.go.id> (Diakses 8 Februari: 09.45)
- <https://bppk.kemenkeu.go.id> (Diakses 12 Maret 2019 : 20.15)
- <https://id.m.wikipedia.org> (Diakses 24 Juni 2019: 16.22)
- <https://timur.ilearning.me/2016/01/04/perbedaan-variabel-independen-dan-variabel-dependen/> (Diakses 5 Juni 2019: 20.15)
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7(13).
- Prety. 2017. Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado dan Kota Bitung (Periode2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi. Manado: Universitas Sam Ratulangi*.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *EKA CIDA*, 1(1).
- Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. In *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP* (Vol. 2, No. 1, pp. 39-51). STIE MDP.”

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.